



Kasus Korupsi Retribusi Terminal Manuver

Tak Menutup Kemungkinan Ada Tersangka Lain

Negara (Bali Post) -

Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana saat ini telah rampung melakukan pemeriksaan terhadap puluhan saksi terkait kasus dugaan korupsi retribusi terminal manuver Gilimanuk. Setelah menetapkan satu tersangka dan melakukan pemberkasan, dari hasil penyidikan itu tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain. Saat ini, penyidik masih menunggu hasil laporan perhitungan kerugian negara dari BPKP.

Kasi Pidsus Kejari Jembrana I Made Pasek Budiawan, Senin (25/9) lalu mengatakan, kasus dengan tersangka inisial D ini secepatnya akan dilimpahkan ke pengadilan. Penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 42 saksi, termasuk tersangka. "Pemeriksaan tersangka terakhir dilakukan minggu lalu, berkas sudah kita buat. Tinggal menunggu laporan kerugian negara dari BPKP," ujar Jaksa asal Karangasem ini. Kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus dugaan korupsi retribusi ini mencapai Rp 400 juta lebih.

Menurutnya, dari tersangka D, ada isyarat untuk mengembalikan uang kerugian yang digunakan ke negara melalui Kejari Jembrana. Tetapi tidak seluruhnya, hanya senilai yang terbukti dinikmati. Dari hasil penyidikan, kasus ini kemungkinan tidak akan berhenti hanya pada satu orang tersangka, tetapi akan merembet ke tersangka lain.

Namun, kemungkinan itu masih dialami dan mengumpulkan bukti-bukti. "Kemungkinan akan ada tersangka lain. Kami harap pihak-pihak yang menikmati uang dari terminal manuver ini untuk mengembalikan kepada negara," tandasnya. Ketika ada niat untuk mengembalikan, maka akan menjadi pertimbangan yang meringankan.

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi ini muncul lantaran ada uang retribusi yang tidak disetorkan ke kas daerah. Antara karcis dan uang yang disetorkan tidak sesuai sehingga ada selisih. Selisih itu menjadi kerugian negara. Retribusi yang menjadi objek pemeriksaan dari Januari 2016 hingga Maret 2017. (kmb26)

Edisi : Rabu, 27 Sept 2017

Hal : 12



Bupati Badung Serahkan Bantuan Rp 2,4 Miliar Pilih Tunai untuk Membeli Kebutuhan Lainnya

BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta memberikan bantuan kepada pengungsi erupsi Gunung Agung Karangsem berupa uang tunai sebesar Rp 2,4 miliar lebih. Dana bantuan ini diberikan kepada pemerintah diterima Bupati Karangsem IGA Mas Sumatri.

Bupati Badung Nyoman Giri Prasta saat meninjau pengungsi di Tanah Ampo, Karangsem, Selasa (26/9) kemarin, mengatakan siap memberikan bantuan penuh kepada warga pengungsi erupsi Gunung Agung. Bantuan yang diberikan kali ini berupa bantuan tunai agar

dapat dimanfaatkan untuk membeli perlengkapan yang belum tersedia. "Kami memilih untuk memberikan bantuan dana. Sehingga Bupati bisa menyalurkan dana ini untuk kebutuhan-kebutuhan warga Karangsem. Kalau semua bawa mi dan mi, maka akan numplek. Kebutuhan lainnya kosong," katanya.

Dengan bantuan tunai yang diberikan, Giri Prasta berharap kebutuhan warga pengungsi yang belum tersedia dapat dipenuhi dari bantuan yang diberikan oleh Pemkab Badung. "Saya tidak akan berhenti di sini. Pemkab

Badung akan terus membantu sesuai dengan kemampuan yang kami miliki," tegas Bupati asal Desa Pelaga yang dikenal *bares* tersebut.

Bupati Giri Prasta juga mengajak seluruh masyarakat untuk turut merasakan penderitaan warga pengungsi akibat erupsi Gunung Agung yang kini telah berstatus Awas. "Ini adalah konsep *manyama braya* yang kita miliki. Dengan semakin banyak bantuan, maka akan semakin ringan beban warga Karangsem," ujarnya dalam kunjungan yang turut didampingi sang istri Nyonya

Seniasih Giri Prasta.

Bupati Giri Prasta menegaskan, pihaknya juga telah menginstruksikan kepada seluruh camat, perbekel, klian desa adat, klian banjar dan warga yang ada di Badung membuka pintu selebar-lebarnya bagi para pengungsi. "Walau diperkirakan 99,9 persen Gunung Agung akan meletus, tapi kami tetap berdo'a supaya tidak terjadi letusan Gunung Agung. Semoga Ida Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua," ujarnya seraya berdo'a memohon lindungan Tuhan. (ad1731)

Edisi : Rabu, 27 Sept 2017

Hal : 3



Terkait Kasus Pungli Penyidik Periksa Bendesa

Adat Tanjung Benoa

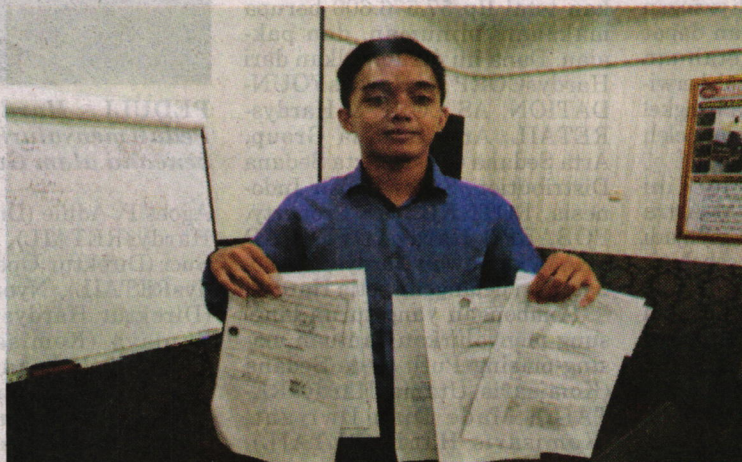
PENYIDIK Subdit I (Keamanan Negara) Direktorat Reskrim Polda Bali mengembangkan kasus pungli perusahaan *water sport* di Desa Tanjung Benoa, Kuta Selatan dengan tersangka berinisial KR. Setelah 74

saksi, penyidik akan memeriksa Bendesa Adat Tanjung Benoa Made Wijaya alias Yonda.

"Hari ini (kemarin - red), Bendesa Adat Tanjung Benoa diperiksa sebagai saksi. Kasus ini akan terus kami dalam," tegas

Direktur Reskrim Kombes Pol. Sang Made Mahendrajaya, Selasa (26/9) kemarin.

Walau ada *pararem*-nya, lanjut Mahendrajaya, pungli tersebut bertentangan dengan hukum positif dan hasil penggalian dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Yonda. Saksi yang diperiksa itu terdiri dari pengelola wisata bahari, karyawan Gali Potensi Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa Adat Tanjung Benoa, klian banjar dan *prajuru* adat Tanjung Benoa. Terkait kasus itu, barang bukti yang diamankan uang Rp 775 ribu, *form daily report* (laporan harian pungutan gali potensi desa) dan kuitansi tanda terima pembayaran, laporan bulanan Gali Potensi Desa dari April 2015 hingga Juli 2017, surat pernyataan pengusaha wisata bahari bersedia membayar uang sesuai dengan *Pararem* Tanjung Benoa, *Pararem* tanggal 25 April 2015 dan surat edaran berisi tentang pengusaha bahari



Bali Post/rah

BARANG BUKTI - Petugas menunjukkan barang bukti kasus pungli di Desa Tanjung Benoa.

Edisi : Rabu 27 Sept 2017

Hal : 3



wajib membayar, sanksi apabila tidak membayar dan besarnya uang pungutan serta kuitansi-kuitansi pengeluaran uang hasil Gali Potensi Desa. "Tanggal 20 Desember 2014, baru disosialisasikan surat pemberitahuan kepada para pengusaha atau pengelola wisata bahari Tanjung Bena. Substansinya agar pengusaha wisata bahari membayar kepada desa adat uang Rp 10 ribu per kepala atau per aktivitas. Permintaan uang tersebut dilakukan dengan tidak ada sosialisasi terlebih dulu," tegasnya.

Selanjutnya, tanggal 25 April 2015 baru disahkan *pararem* berdasarkan *paruman* empat banjar dan disepakati setiap perusahaan wajib membantu Desa Tanjung Bena dalam memfasilitasi penitipan harga di atas *nett price* yang diatur berdasarkan kesepakatan internal perusahaan dalam wadah DPC Gahawisri, ditindaklanjuti dengan surat edaran berisi

besarnya nilai pungut adalah Rp 10 ribu per kepala atau per aktivitas. Di Tanjung Bena ada 24 perusahaan *water sport*, tiga perusahaan penangkaran penyudi di Tahura dan kapal Quiksilver yang dipungut biaya tersebut. "Sedangkan penumpang kapal Quiksilver dipungut Rp 5 ribu per bulan dan diambil tiap bulan. Uang hasil pungutan itu sekitar Rp 200 juta tiap bulan. Uang tersebut digunakan bayar *fee* pengacara untuk biaya operasional perkaranya di Polda Bali sekitar Rp 1 miliar lebih," ungkapnya.

Seperti diberitakan, tim Subdit I (Keamanan Negara) Direktorat Reskrimum Polda Bali dipimpin Kasubdit I AKBP Tri Kuncoro mengamankan seorang wanita berinisial KR di salah satu perusahaan *water sport* di Desa Tanjung Bena, Kuta Selatan, Badung, Rabu (2/8) lalu. KR diduga mengambil uang hasil pungli terhadap wisatawan yang datang ke sana. (rah)

Edisi : Rabu, 27 Sept 2012

Hal : 3